

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu faktor penting dalam era globalisasi yang berkembang secara cepat dan modern. Perkembangan teknologi dilandasi dengan berkembangnya mikro elektronika, material dan perangkat lunak. Perkembangan teknologi juga diikuti dengan berkembangnya kehidupan manusia, yaitu semua kegiatan manusia yang biasanya dilakukan dengan manual, kini dapat dilakukan dengan digital. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat, misalnya para pelaku bisnis dalam melakukan transaksi dengan rekannya dapat menggunakan internet (Ahmad M. Ramli, 2010: 1). Internet yang sangat mudah diakses mempermudah setiap orang untuk melakukan komunikasi yang sangat luas yang biasa disebut dengan *cyber space*. *Cyber space* dapat diartikan ruang maya, terhubungnya komputer dengan saluran penyedia jasa internet yang dapat diakses kapan saja, tanpa mengenal batas ruang dan waktu (Sutarman, 2007: 4).

Cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan

menyalahgunakan kemudahan teknologi digital (Abdul Wahid, 2005: 40). *Cyber crime* dalam beberapa literatur sering diidentikan dengan *computer crime*. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian *Computer Crime* sebagai: “*any illegal act requiring knowledge of computer for its perpetration, investigation, or prosecution*”, artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki dan menuntutnya (H. Kadish Sanford, 1983: 218). Pengertian lain diberikan oleh *Organization of European Community Development*, yaitu “*any illegal, unethical or unauthorized data*”, artinya setiap perilaku illegal, tidak pantas, tidak punya kewenangan yang berhubungan dengan pengelolaan data dan pengiriman data (Widoyopramono, 1994:29).

Sarana kejahatan *cyber* tidak hanya menggunakan internet dan komputer, tetapi dapat dilakukan melalui *handphone* atau biasa disebut dengan (HP). Kejahatan melalui dunia selular menjadi sarana utama bagi para pelaku, karena kebanyakan dari masyarakat khususnya di Indonesia sebagian besar memiliki HP. Bisnis melalui *handphone* khususnya di kota-kota besar di Indonesia juga mulai merebak, diantaranya *Content Provider* (CP atau penyedia konten) dan Operator selular. Operator seluler merupakan produk jasa yang memberikan layanan dan fasilitas bagi pengguna *handphone* untuk dapat berkomunikasi. Fasilitas yang diberikan tidak hanya sebagai penghubung komunikasi yang hanya difokuskan pada penyediaan pulsa untuk percakapan saja, tetapi sesuai perkembangan teknologi saat ini, yaitu SMS (*Short Message Service*), MMS (*Multimedia Message Service*), layanan jasa perbankan, akses

internet, dan sebagainya (<http://awards.xl.co.id/index.php:industri-telekomunikasi-seluler-di-indonesia-pada-saat-ini-dan-bisnis-model-yang-tepat>, diakses tanggal 1 Oktober 2013). *Content Provider* yang dimaksud adalah penyedia layanan, misalnya SMS Cinta, SMS Kuis, SMS Artis, SMS untuk mendownload RBT (*Ring Back Tone*). Pengguna ponsel yang semakin meningkat dalam menerima dan mengirimkan SMS, maka semakin banyak layanan *Content Provider* yang ditawarkan. SMS *Push* adalah layanan berbasis langganan dengan cara pendaftaran terlebih dahulu yang biasa diikuti dengan kata “REG”, dan selanjutnya secara rutin penyelenggara konten akan mengirimkan SMS kepada pelanggan. Pelanggan yang akan berhenti berlangganan dapat mengirimkan permohonan yang biasa diawali dengan kata “UNREG” (<http://adityawirawan.net/2008/06/27/>, diakses tanggal 1 Oktober 2013)

Kasus penyedotan pulsa yang marak terjadi khususnya di Indonesia belum mendapatkan kepastian hukum berupa peraturan hukum yang dimuat secara khusus. Tingkat kriminalitas yang semakin tinggi tidak sebanding dengan rendahnya penyelesaian didalamnya, sehingga dapat memberikan angin segar kepada pelaku yang diduga melakukan penyalahgunaan. Sanksi yang dapat diterapkan bagi pelaku kejahatan penyedotan pulsa harus sesuai dengan unsur-unsur dari hukum di Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Keterbatasan mengenai barang bukti yang harus didapatkan menjadi kendala bagi aparat penegak hukum. Kendala yang dihadapi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor

diantaranya belum banyak penyidik POLRI yang mendapat pendidikan mengenai cara penanganan tentang *cyber crime*, dan alat bukti yang digunakan dalam pembuktian juga sangat terbatas.

Kasus kejahatan yang terjadi yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang begitu pesat, maka diperlukan peran serta dari aparat penegak hukum. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi kultur, struktur dan substansi hukum pidana (Al Wisnubroto, 1999:10). Perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat digunakan politik hukum pidana. Politik hukum pidana mempunyai tujuan yang praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang. Politik hukum pidana merupakan studi mengenai teknik perundang-undangan, serta kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Barda Nawawi, 1996; 25).

Penal policy atau politik (kebijakan) hukum pidana itu pada intinya mencakup bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif),

kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi tahapan-tahapan berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang. Sebagai upaya untuk mempositifkan nilai-nilai yang terkandung didalam masyarakat, maka politik hukum sangat diperlukan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Politik hukum pidana yang merupakan bagian dari politik hukum, dimana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengetahui sistem nilai yang terkandung didalam masyarakat, sehingga penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Teguh Prasetyo, 2010; 3).

Perkembangan kejahatan teknologi, khususnya terhadap pelaku penyedotan pulsa tidak sebanding dengan produk hukum yang dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan yang ada dalam *cyber crime*, dan juga sejauh mana *cyber crime* dapat berkembang, sehingga adanya penegakan hukum yang sesuai. Titik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, dapat dirumuskan Masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakeberadaan *ius constitutum* yang terkait dengan penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan sarana hukum pidana?
- b. Bagaimana kebijakan formulatif terhadap upaya penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dalam *ius constituendum*?

C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

Bertolak dari perumusan masalah yang diangkat dalam kaitanya dengan judul penelitian, “Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa”, maka batasan masalah untuk permasalahan pertama fokusnya adalah keberadaan politik hukum pidana yang terkait dengan kebijakan aplikasi. Hukum pidana positif di Indonesia belum ada yang memuat ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan penyedotan pulsa, sehingga menimbulkan permasalahan bagi aparat penegak hukum dalam mengatasi permasalahan *cybercrime*, khususnya kejahatan penyedotan pulsa. Untuk permasalahan kedua, penelitian ini mengangkat kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pembaharuan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa, dimana perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini telah berkembang dengan sangat pesat khususnya pada masyarakat yang menggunakan *handphone* (HP) sebagai sarana untuk berkomunikasi. Tindak kejahatan penyedotan pulsa yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi telekomunikasi harus diikuti juga

dengan perlindungan hukum yang dapat mengayomi masyarakat, sehingga perlu diwujudkan adanya ketentuan didalam hukum pidana positif yang mengatur mengenai kejahatan penyedotan pulsa.

Bertolak dari rumusan masalah yang diangkat dalam kaitannya dengan judul “Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa”, maka dalam penelitian ini penulis membatasi beberapa hal yang akan diteliti. Hal yang akan diteliti yaitu mengenai:

a. Politik hukum pidana

Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Teguh Prasetyo, 2013; 3). Politik hukum pidana juga merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu (M. Hamdan, 1997: 6).

b. *Content provider*

Content providers sering disebut juga CP atau penyedia konten. CP yang dimaksud diantaranya adalah layanan SMS Cinta, SMS Kuis, SMS Artis, SMS untuk mendownload RBT (*Ring Back Tone*), SMS untuk mendownload game.

c. Operator

Operator dalam hal ini berkaitan dengan operator pulsa, baik CDMA maupun GSM. Operator selular di Indonesia yaitu Indosat, XL, Telkomsel, Telkom, *Three*, *Axis*, *Smartfren*, *Ceria*, *Mobile 8*, *AHA*.

d. Pulsa

Pulsa adalah satuan dalam perhitungan biaya telepon (Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 906). Pembelian pulsa dapat dilakukan dengan menggunakan voucher maupun elektrik, dan tersedia dengan beragam nominal, dari harga Rp.5.000,00 sampai dengan Rp.200.000,00, sesuai dari masing-masing operator.

e. Kejahatan penyedotan pulsa

Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan goncangan dalam masyarakat (Abdul Wahid, 2005: 38). Penyedotan pulsa adalah kejahatan yang dilakukan oleh *content provider* dan operator dengan sarana pengiriman SMS maupun format pengecekan pulsa agar pengguna *handphone* dapat mendaftar *content* tertentu.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang akan penulis lakukan dengan judul “Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa”, bukan sebuah plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Sepengetahuan penulis belum ada penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama dengan tesis ini.

Namun ada beberapa tesis yang senada sebagai berikut, yakni tentang kesamaan tema tentang *cybercrime*, dengan permasalahan yang berbeda:

1. Irene Putrie, Program Studi Magister Ilmu Hukum tahun 2004 Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, dalam tesis meneliti tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan *CyberCrime*. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah Bagaimanakah kebijakan hukum pidana saat ini dalam penanggulangan *cybercrime*? dan Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam penanggulanagan *cybercrime* dimasa datang?

Penekanan yang membedakan tesis ini dengan penelitian yang dilakukan adalah tesis ini menekankan pada kebijakan hukum pidana saat ini dan dimasa yang akan datang dalam penanggulangan *cybercrime*

2. Suroso, Program Studi Magister Ilmu Hukum tahun 2007 Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, dalam tesis meneliti tentang Kebijakan Kriminal Cyber Crime terhadap Anak. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah Jenis-jenis *Cyber Crime* apa saja yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak? dan Bagaimana kebijakan kriminal saat ini dan yang akan datang terhadap *Cyber Crime* yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak? Penekanan yang membedakan tesis ini dengan penelitian yang dilakukan adalah tesis ini menekankan pada jenis-jenis *cyber crime* dan sejauh mana kebijakan kriminal dapat menanggulangi kejahatan yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak.

3. Philemon Ginting, Program Studi Magister Ilmu Hukum tahun 2008 Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, dalam tesis meneliti tentang Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi pada saat ini?, dan Bagaimana kebijakan aplikasi yang dilakukan aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi? Penekanan yang membedakan tesis ini dengan penelitian yang dilakukan adalah tesis ini menekankan pada kebijakan formulasi dan kebijakan aplikasi terhadap tindak pidana teknologi informasi melalui hukum pidana.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa penulisan hukum dengan judul “Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa” merupakan karya asli penulis bukan merupakan duplikasi atau plagiat. Karya penulisan ini adalah karya penulis. Letak kekhususan dalam penulisan ini terletak pada keberadaan *ius constitutum* yang terkait dengan penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan sarana hukum pidana dan kebijakan formulatif terhadap upaya penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dalam *ius constituendum*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian adalah:

1. Hasil dari penulisan ini nantinya diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi ataupun sumbangan bagi ilmu pengetahuan, terutama mengenai

pentingnya pemahaman tentang penerapan politik hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa.

2. Hasil dari penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak yang terkait dalam menangani pidana tentang *cyber crime*, serta sebagai tambahan referensi didalam hukum pidana, khususnya dalam penegakan hukum *cybercrime*.
3. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat Undang–Undang mengenai *cyber crime*.
4. Hasil dari penulisan ini diharapkan memberikan informasi-informasi yang berguna dan penting bagi masyarakat menyangkut penerapan politik hukum pidana, serta masyarakat dapat menyadari betapa pentingnya manfaat dari penerapan politik hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada Rumusan Masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan *ius constitutum* yang terkait dengan penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan sarana hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan formatif terhadap upaya penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dalam *ius constituendum*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini penulis menjelaskan mengenai sistematika penulisan tesis. Dalam Bab I, penulis membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Sistematika Penulisan. Dalam Bab II dijelaskan mengenai, politik hukum pidana, kejahatan penyedotan pulsa, dan hukum pidana dan perkembangan kejahatan teknologi informasi. Bab III membahas mengenai metode penelitian yaitu jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, proses berpikir. Sistematika Penulisan Dalam Bab IV dijelaskan mengenai, keberadaan *ius constitutum* yang terkait dengan penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan sarana hukum pidana, dan kebijakan formatif terhadap upaya penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dalam *ius constituendum*. Bab V membahas mengenai kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian.